

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL SERTA KEBIJAKAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA



**SUSANTY PAKAMBANAN PONGTAMBING
1410321018**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL SERTA KEBIJAKAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi S1 Akuntansi

**SUSANTY PAKAMBANAN PONGTAMBING
1410321018**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL SERTA KEBIJAKAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh

SUSANTY PAKAMBANAN PONGTAMBING
1410321018

telah diperiksa dan telah diuji
Makassar, 12 September 2018

Pembimbing



Herawati Dahlan, S.E., M.Ak

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL SERTA KEBIJAKAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Disusun dan diajukan oleh

SUSANTY PAKAMBANAN PONGTAMBING
1410321018

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **12 September 2018** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak	Ketua	1..... 
2	Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
3	Nurbayani, S.E., M.Si	Anggota	3..... 
4	Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M	Eksternal	4..... 

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : SUSANTY PAKAMBANAN PONGTAMBING

NIM : 1410321018

Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Serta Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 atau 2 dan pasal 70).

Makassar, 12 September 2018

Yang membuat pernyataan,



Susanty Pakambanan Pongtambing

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Serta Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara”**.

Penulis menyadari bahwa dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, tidak luput dari berbagai macam hambatan dan tantangan. Namun semua dapat terlewati dengan baik atas berkat dan pertolongan Tuhan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, petunjuk dan bimbingan.

Penghargaan dan terima kasih kepada Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan, perhatian dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis agar menjadi pribadi yang sukses, dan menjadi kebanggaan keluarga.

Secara khusus, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ibu Herawati Dahlan, S.E.,M.Ak selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta koreksi selama penyusunan skripsi. Semoga Tuhan memberikan perlindungan, kesehatan dan berkat yang berlipat ganda atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Pada kesempatan ini penghargaan dan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Jabbar, MPA selaku Rektor Universitas Fajar Makassar yang telah mengatur segala aturan dan kebijakan di Universitas Fajar Makassar.
2. Bapak Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar yang telah memfasilitasi selama penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi dan ilmu-ilmu social Universitas Fajar Makassar.
3. Bapak Muhammad Gafur, S.E., M.Si. selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar Makassar yang telah memfasilitasi selama penyelesaian studi di jurusan Akuntansi Universitas Fajar Makassar.
4. Ibu Dinar, S.E.,M.SI selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi S1 Unifersitas Fajar Makassar.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan yang tidak ternilai harganya.
6. Seluruh Staf Universitas Fajar Makassar.
7. Teman seperjuangan Angkatan 2014 yang memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Om Saba' Sombolinggi , Kak Rozzy Bandaso, Kak Willyam Pakendek, dan Ibu Vemi Sibala yang membantu selama penelitian ini.
9. Saudaraku Somba Tambing, Zamantha Datu, Bimbo Pongtambing, Afner Pongtambing, Yolanda Bara' Langi' yang tiada henti-hentinya mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabatku Since Lolo Allo, Putri Datu Rante, Kak Irfani Poton yang selalu siap mendengarkan setiap keluh kesah penulis, yang selalu menemani dalam suka maupun duka.

11. Andi Rauf Sibala yang selalu menemani, membantu dan memberikan semangat, dukungan saat mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sehingga penulis dapat berkarya lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membutuhkannya.

Makassar, Agustus 2018

Hormat saya

Susanty Pakambanan Pongtambing

**Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
serta Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah KabupatenToraja Utara**

Susanty Pakambanan Pongtaming

Herawati Dahlan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Serta Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. Pengujian menggunakan analisis regresi linier berganda dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner.

Populasi penelitian terdiri dari PPK-SKPD di Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengisi kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Serta Kebijakan Akuntansi baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Kata kunci :Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kebijakan Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Penmerintah Daerah

The Influence of the Implimentation of accrual-Based Government Accounting Standards and Accounting Policies on the Quality of the Financial Statements of the North Toraja District Government

Susanty Pakambanan Pongtambing

Herawati Dahlan

ABSTRACT

This study aims to examine the affect of the implementation of accrual-based government accounting standards and accounting policies on the quality of the quality of the Toraja Regency Regional Government Financial Reports. The test uses multiple linear regression analysis of the data collected using a questionnaire.

The study population consists of PPK-SKPD in North Toraja District Government. The research method used is to fill out a questionnaire. Data analysis was performed using SPSS (Statistical Package for Social Science) version 25. The results showed that the effect of the implementation of accrual-based accounting standards and accounting policies both simultaneously and partially affect the quality of the financial repost of the North Toraja District Government.

Keywords : Application of Accrual-Based Government Accounting Standards, Accounting Policies and Quality of Local Government Financial Reports

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 . Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktisi	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Standar Akuntansi Pemerintahan.....	8
2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akural.....	8
2.2. Akuntansi Pemerintahan.....	13
2.3. Kebijakan Akuntansi	14
2.3.1 Tujuan Kebijakan Akuntansi	15
2.3.2 Kebijakan Akuntansi Bagi Pemakai Laporan Keuangan.....	17
2.3.3 Keanekaragaman Kebijakan Akuntansi dan Pengungkapannya.....	21

2.4 . Kualitas Laporan Keuangan.....	23
2.5 . Pemerintahan Daerah.....	24
2.6. Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	25
2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.....	25
2.6.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	25
2.6.3 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	27
2.6.4 Komponen Laporan Keuangan Menurut PP No. 71 Tahun 2010.....	30
2.7 Tinjauan Empirik(Penelitian Terdahulu)	33
2.8 Kerangka Pemikiran.....	35
2.8.1. Hubungan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	35
2.9 Defenisi Operasional	36
2.10 Hipotesis Penelitian	40

BAB III METODOE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Tempat Dan Waktu.....	41
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	41
3.3.1Populasi Penelitian	41
3.3.2Sampel Penelitian.....	42
3.4Jenis Dan Sumber Data.....	42
3.5. Teknik Pengumpulan Data	43
3.6. Defenisi Oprasional Dan Pengukuan Variabel.....	43
3.7. Metode Analisa Data	46
3.7.1. Uji Kualitas Instrumendan Data	46
3.7.1.1. Uji Validasi	46
3.7.1.2. Uji Reabilitas.....	46
3.7.2. Analisis Statistik Deskriptif.....	46

3.7.3. Uji Asumsi Klasik	47
3.7.3.1. Uji Normalitas	47
3.7.3.2. Uji Heteroskedastisitas	47
3.7.4. Analisis Regresi Linier Berganda.....	47
3.7.5. Pengujian Hipotesis	48
3.7.5.1. Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	48
3.7.5.2. Uji Simultan (Uji F)	48
3.7.5.3. Uji Parsial (Uji Statistik t).....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian	50
4.2 Analisis Deskriptif	50
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	52
4.3.1 Uji Normalitas.....	52
4.3.2 Uji Multikolinieritas.....	54
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	54
4.4 Pengujian Hipotesis.....	56
4.4.1 Analisis Linier Berganda.....	56
4.4.2 Uji Parsial (Uji t).....	56
4.4.3 Uji Simultan (<i>Uji F</i>).....	58
4.4.4 Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	58
4.5 Pembahasan.....	59
4.5.1 Hubungan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...59	
4.5.2 Hubungan Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....60	

4.5.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Serta Kebijakan Akuntansi Berpengaruh Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	62
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komponen Laporan Keuangan Menurut PP No.71 Tahun 2010 ..	30
Tabel 2.2	Review Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	45
Tabel 4.1	Hasil Deskriptif	51
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinieritas	54
Tabel 4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas	55
Tabel 4.5	Hasil Regresi Berganda.....	56
Tabel 4.6	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	57
Tabel 4.7	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	58
Tabel 4.8	Hasil Uji Determinasi (R^2).....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikiran	28
Gambar 4.1 Histogram	53
Gambar 4.2 Normal P-P Plot.....	53
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya.

Instansi pemerintahan wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya reformasi dan pengembangan diperlukan khususnya dibidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat (Mardiasmo, 2004).

Perubahan yang signifikan dalam reformasi di bidang keuangan negara adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang kemudian menjadi salah satu isu sangat penting di pemerintahan Indonesia. Salah satu hal penting dalam pengembangan keuangan negara adalah terkait dengan sistem akuntansi pemerintahannya, yaitu dengan melakukan pembenahan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan

pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Reformasi keuangan pemerintah pada tahun 2003 ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 36 UU No.17 tahun 2003 tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah Indonesia diharuskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual selambat-lambatnya lima tahun setelah peraturan tersebut ditetapkan. Artinya pemerintah Indonesia harus sudah melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual pada tahun 2008 (Noerdiawan, 2009).

Fakta yang terjadi adalah sampai tahun 2008, pemerintah belum melaksanakan amanat dari UU No. 17 tahun 2003. Hal tersebut dapat ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 (PP No.24 tahun 2005) tentang SAP berbasis *Cash Toward Accrual* (SAP CTA) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya SAP CTA adalah untuk menjembatani pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual.

Kualitas laporan keuangan pemerintah erat kaitannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat dalam standar akuntansi yang berlaku, oleh karena itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) haruslah mengacu kepada SAP yang telah ditetapkan. SAP berfungsi sebagai acuan apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah disusun berdasarkan sistem yang memadai dan informasi yang termuat apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Akuntansi pemerintahan semakin berkembang dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (PP No. 71 tahun 2010) tentang SAP berbasis

akrual. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 terbit pada tanggal 22 Oktober 2010, dengan ditandai lahirnya PP No. 71 tahun 2010 maka berakhir pula era PP No. 24 tahun 2005. Menurut Widyastuti (2015) Akuntansi berbasis akrual adalah salah satu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa ekonomi lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan aliran masuk atau keluar dari kas ataupun setara kas, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya yang dicatat. Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Mardiasmo (2004) yaitu pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan suatu asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah, agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Obaidat, 2007; dalam Hapsari 2008). Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan dapat dipenuhi dengan laporan yang disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD disusun berdasarkan Standar akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disampaikan kepada DPRD secara tepat waktu merupakan upaya konkrit mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemeriksaan atas laporan keuangan diperlukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia (Bowo, 2009). Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan SAP; kecukupan pengungkapan; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas pengendalian intern.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa sebagai pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus memenuhi standar dan karakteristik. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah menurut PP No. 71 Tahun 2010 antara lain:

1. Relevan,
2. Andal,
3. Dapat dibandingkan,
4. Dapat dipahami.

Tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah dihasilkannya laporan keuangan yang telah memenuhi keempat karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut (Wati, 2014). Permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah masih banyak ditemukan ketidakberesan, ketidakteraturan dan ketidakbenaran, dan bahkan penyimpangan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah termasuk banyaknya aset negara yang dikelola secara tidak layak dan dilaporkan secara tidak wajar dalam laporan keuangan yang berimplikasi pada opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Opini atas Laporan Keuangan Daerah

(LKPD) berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*, Wajar Dengan Pengecualian.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah dan memiliki hubungan yang kuat, artinya jika SAP telah diterapkan dengan baik, maka akan meningkatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul : “ Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Serta Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu

- a. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
- b. Apakah Kebijakan Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
- c. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Serta Kebijakan Akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

b. Untuk mengetahui Pengaruh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

c. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual serta Kebijakan Akuntansi secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 1 Kegunaan Teoretis

Guna memberikan informasi, menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kebijakan akuntansi . Selain itu dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mendukung pelaksanaan tugas otonomi daerah khususnya sebagai pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Memperoleh manfaat pengetahuan lebih tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan efektif dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta kebijakan akuntansi terhadap kualitas

laporan keuangan pada Kabupaten Toraja Utara tersusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka pemikiran atau alur penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pokok pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi sejarah Kabupaten Toraja Utara, gambaran umum lokasi penelitian serta hasil dan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penelitian ini yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian mengenai permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode yang telah disebutkan. Bab ini juga menyertakan saran-saran bagi penelitian berikut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Mardiasmo (2004) mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan menurut PP No. 71 Tahun 2010 yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, maka dengan kata lain Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu syarat yang mempunyai kekuatan hukum didalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Noerdiawan (2009) mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan baik di pemerintah pusat dan departemen- departemennya, ataupun pemerintah daerah dan dinas-dinasnya.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Menurut PP No. 71 seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dapat mengimplementasikan SAP dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrua, didalam wacana akuntansi,

secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan bila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar, nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan, tetapi dengan memasukan seluruh beban, baik yang sudah dibayar ataupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang, dalam rangka pengukuran kinerja, serta informasi berbasis akrual dipercaya dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya, oleh karena itu akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah (KSAP, 2006).

Widjajerso (2008) menjelaskan beberapa alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi seperti informasi tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
2. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
3. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, SAP Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis

akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Purwita (2013) berpendapat bahwa penerapan SAP ini memerlukan pemahaman yang baik dari setiap aparatur yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik di Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah berserta instansi-instansi yang terkait didalamnya. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wajib dilaksanakan, akan tetapi dalam penerapan tersebut perlu dipahami beberapa dasar pemikiran penting yang diharapkan dapat membantu penerapan SAP. Menurut hasil pemikiran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam penerapan SAP berbasis akrual, yaitu:

1. Regulasi
2. Sistem dan sarana pendukung
3. Sumber daya manusia

Berikut merupakan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam penerapan SAP berbasis akrual:

1. Regulasi

Kebijakan akuntansi disusun oleh setiap pemerintah daerah berdasarkan panduan penyusunan kebijakan akuntansi sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah wajib ditetapkan oleh sebuah perda sesuai Pasal 4 (4), terdiri atas:

1. Kebijakan pelaporan Laporan Keuangan dalam berbagai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01, 02, 03, 04, 11 dan 12 yang menjadi unsur Laporan Keuangan sesuai Pasal

4(2).

2. Kebijakan akuntansi terpilih oleh pemerintah daerah tersebut untuk setiap pos LK atau akun Buku Besar seperti PSAP 05, 06, 07, 08, 10, *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) dan Buletin Teknis (Bultek) terkait PSAP tertentu, sesuai Pasal 4 (3) berlaku bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalampemda tersebut. Untuk menjamin kelayakan penerapan PSAP 11, kebijakan pelaporan Laporan Keuangan, kebijakan periode laporan, dan kebijakan akuntansi terpilih bagi entitas akuntansi pemda yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), serta entitas pelaporan pemda tersebut termasuk entitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai satuan kerja berkebebasan khusus tertentu, haruslah tepat.

Berbagai hal penting dalam Panduan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengutipan SAP atau PSAP harus dilakukan secara terpilih dan berazas guna bagi pengguna Perda Kebijakan Akuntansi.
- b. Menyalin sebagian besar SAP dan/atau PSAP tertentu sebagai bagian Perda Kebijakan Akuntansi sedapat mungkin dihindari.
- c. Landasan berfikir pemilihan suatu metode akuntansi yang paling tepat bagi suatu pemda tertentu yaitu berbagai buku teks akuntansi atau sumber lain yang berkualitas tinggi. Dalam kasus tersebut, Peraturan Menteri mengizinkan bahwa Perda Kebijakan Akuntansi dapat menggunakan rujukan lain selain PP No. 71 Tahun 2010, misalnya peraturan perundang-undangan dan

pustaka terkait kebijakan akuntansi terpilih pemda tersebut. Sumber rujukan sebaiknya disebutkan dalam Perda Kebijakan Akuntansi.

- d. Perda wajib mengatur pelaporan dan kebijakan akuntansi untuk pos atau akun yang belum diatur secara eksplisit oleh SAP atau PSAP manapun yang *de facto* terdapat pada pemda tersebut.
- e. Bentuk kasat mata Perda Kebijakan sebaiknya mengikuti contoh tersaji pada Butir C Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri. (Hoesda, 2014 melalui <http://ksap.org>).

Selain itu disinyalir bahwa dengan adanya indikasi kewaspadaan resiko, perda kebijakan akuntansi menjadi terlampau sulit untuk diterapkan. Dalam proses penyusunan regulasipun instansi pemerintahan perlu mengetahui bahwa adanya pemilihan metode dalam pencatatan akuntansi, dan wajib mengatur pelaporan serta kebijakan akuntansi.

2. Sistem dan Sarana Pendukung

Penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT *based system* yang lebih rumit, hal tersebut dapat dilihat dari kompleksitas implementasi dalam akuntansi berbasis akrual. Sistem pengendalian intern yang memadai perlu dibangun untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 2004 yang menyatakan “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden

selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh”.

3. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, selanjutnya selambatnya-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada DPR dan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan.

Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, terutama dalam penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pemerintah pusat dan juga daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan, termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan, di samping itu peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan. (Solehudi, 2012 melalui <http://milamashuri.wordpress.com>).

2.2 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan suatu bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan mengenai transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah akan memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Sebagai salah satu bidang ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tidak akan terlepas dari pemahaman tentang

akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia (Setiawati, 2013). Bahtiar (2008) mendefinisikan Akuntansi Pemerintahan sebagai: Suatu Aktifitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Jenis yang dicatat di dalam akuntansi pemerintahan adalah transaksi keuangan pemerintah yang sebagian akan memiliki karakteristik tersendiri dan membedakannya dengan transaksi di dalam akuntansi bisnis. Noerdiawan (2009) mengatakan bahwa akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi Keuangan Negara, termasuk kesesuaian yang berlaku.

2.3 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut yang sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan perlu disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan

secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi.

2.3.1 Tujuan Kebijakan Akuntansi

1. Tujuan umum kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
2. Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi :
 - a) Penyusunan laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar
 - b) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun dengan standar akuntansi pemerintahan
 - c) Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar Akuntansi

Faktor-faktor lainnya yang harus dipertimbangkan dalam bentuk kerangka kebijakan akuntansi hanyalah salah satu informasi keuangan bagi individu. Keputusan mengenai kebijakan akuntansi harus mempertimbangkan sumber-sumber alternatif diluar akuntansi yang menyajikan informasi yang tersedia secara lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah bagi perusahaan dan investor. Secara singkat tujuan kebijakan akuntansi berfokus pada para pemakai informasi keuangan. Akan tetapi hal ini hanya mungkin dilakukan melalui cara parsial dari teori-teori induktif deduktif atau dari analisa penelitian dalam bentuk pemrosesan informasi individu. Kesulitannya adalah bahwa pendapatan

individu, badan (perusahaan) dan kelompok tidak dapat dikombinasikan untuk membentuk suatu pendapatan secara keseluruhan yang unik. Alternatifnya adalah memfokuskan tujuan kebijakan akuntansi pada konsekuensi yang menguntungkan dan merugikan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi paling tidak penyeimbang. Ini menetapkan tujuan yang benar bagi penetapan kebijakan akuntansi.

Kebijakan Akuntansi dibuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi:

1. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan ; dan
2. Dapat diandalkan, dengan pengertian mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan organisasi, menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya, netral yaitu bebas dari berpihakan mencerminkan kahati-hatian dan mencakup semua hal yang material.

Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan pelaporan keuangan :

1. Petimbangan Sehat ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut harusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.
2. Substansi mengungguli bentuk transaksi dan kejadian lain harus di pertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realitas kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk

hukum transaksi atau kejadian.

3. Materialitas Laporan Keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

Laporan keuangan harus jelas dan dapat dimengerti, berdasar pada kebijakan akuntansi yang berbeda diantara suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dalam satu negara maupun antar negara. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Pengungkapan hal ini sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, atau laporan lainnya dari pengungkapan kebijakan terpilih.

2.3.2 Kebijakan Akuntansi Bagi Pemakai Laporan Keuangan

Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda-beda, seperti pemegang saham, kreditur dan karyawan. Pemakai penting lain meliputi pemasok, pelanggan, organisasi perdagangan, analisisn keuangan, calon investor, penjamin, ahli statistik, ahli ekonomi, petugas pajak dan pihak yang berwenang membuat peraturan. Para pemakai laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian handal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi yang penting dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun kebijakan akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Dasar penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (sekarang Bapepam dan LK) dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasi ini adalah konsep biaya perolehan (historicalcost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, antara lain persediaan yang dinyatakan sebesar nilai uang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Laporan keuangan konsolidasi ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah mata uang rupiah (Rp).

2. Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan perusahaan dan anak perusahaan yang dikendalikannya, dimana perusahaan memiliki lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara di anak perusahaan dan dapat menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari anak perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas anak perusahaan tersebut. Sebuah anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila sifat pengendaliannya adalah sementara karena anak perusahaan tersebut

diperoleh dengan tujuan akan dijual kembali dalam waktu dekat atau jika ada pembatasan jangka panjang yang mempengaruhi kemampuan anak perusahaan untuk memindahkan dananya ke perusahaan. Saldo atas transaksi termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan dan akan perusahaan sebagai satu kesatuan usaha. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama.

3. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan perusahaan dan akan perusahaan, kecuali Mayora Nederland B.V diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan.

4. Transaksi Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah

- a. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan perusahaan.

- b. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung, suatu kepentingan hak suara diperusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor.
- c. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempengaruhi wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manager dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut.
- d. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut.

5. Pajak Penghasilan

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

6. Laba per Lembar

Laba perlembar dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan

jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

7. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis.

2.3.3 Keanekaragaman Kebijakan Akuntansi dan Pengungkapannya

Tugas interpretasi laporan keuangan sulit dilaksanakan jika menggunakan berbagai kebijakan beberapa bidang (akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan lain-lain) atau wilayah akuntansi yang berbeda (wilayah akuntansi per negara, kumpulan negara dan lain-lain). Di dunia belum ada sebuah daftar tunggal kebijakan akuntansi dapat digunakan bersama-sama, sehingga para pemakai dapat memilih dari daftar tunggal itu, sehingga perbedaan pilihan kebijakan berdasar pertimbangan kejadian, syarat dan kondisi yang serupa. Contoh berikut adalah bidang yang menimbulkan perbedaan kebijakan akuntansi dan karena itu di perlukan pengungkapan atas perlakuan akuntansi terpilih :

1. Umum
 - a. Kebijakan konsolidasi
 - b. Konversi atau penjabaran mata uang asing meliputi pengakuan keuntungan dan kerugian pertukaran
 - c. Kebijakan penilaian menyeluruh seperti harga perolehan, daya beli umum, nilai penggantian
 - d. Peristiwa setelah tanggal neraca

- e. Sewa guna usaha, sewa beli atau transaksi cicilan dan bunga
 - f. Pajak
 - g. Kontrak jangka panjang
 - h. Franchise atau waralaba
2. Aktiva
- a. Piutang
 - b. Persediaan (persediaan dan barang dalam proses) dan beban pokok penjualannya
 - c. Aktiva dapat disusutkan dan penyusutan
 - d. Tanaman belum menghasilkan
 - e. Tanah yang dimiliki untuk pembangunan dan biaya pembangunan
 - f. Investasi pada anak perusahaan, investasi dalam perusahaan asosiasi dan investasi lain
 - g. Penelitian dan pengembangan
 - h. Paten dan merek dagang
3. Kewajiban dan Penyisihan
- a. Jaminan
 - b. Komitmen dan kontijensi
 - c. Biaya pensiun dan tunjangan hari tua
 - d. Pesangon dan uang penggantian
4. Keuntungan dan kerugian
- a. Metode pengakuan pendapatan
 - b. Pemeliharaan, reparasi-reparasi (repairs), dan penyempurnaan

- c. Untung rugi penjualan aktiva
- d. Akuntansi dana, wajib atau tak wajib, termasuk pembebanan dan pengkreditan langsung ke perkiraan surplus.

Kebijakan akuntansi dewasa ini tidak secara teratur dan tidak secara penuh diungkapkan dalam semua laporan keuangan. Perbedaan besar masih terjadi dalam bentuk, kejelasan dan kelengkapan pengungkapan yang ada dalam suatu negara maupun antar negara atas kebijakan akuntansi harus diungkapkan. Dalam sebuah laporan keuangan, beberapa kebijakan akuntansi yang penting telah diungkapkan sementara kebijakan akuntansi yang penting lain tidak diungkapkan. Bahkan pada negara-negara yang mewajibkan pengungkapan atas kebijakan akuntansi penting, tak selalu tersedia pedoman yang menjamin keseragaman metode pengungkapan. Pertumbuhan perusahaan multinasional dan pertumbuhan teknologi keuangan internasional telah memperbesar kebutuhan keseragaman laporan melewati batas negara.

Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan perlu diungkapkan, dampak perubahan secara kuantitatif harus dilaporkan. Kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

2.4 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya.

Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Obaidat, 2007; Hapsari, 2007). Atril dan McLaney (1991) dalam Saidin (2007) menyebutkan kriteria yang harus dimiliki oleh pelaporan keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna, diantaranya adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dimengerti, tepat waktu dan biaya/manfaat. Ditegaskan bahwa relevan dan dapat diandalkan dari pelaporan keuangan dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang bermanfaat, namun jika laporan keuangan tidak dapat dibandingkan, tidak dapat dimengerti dan tidak tepat waktu, biaya yang lebih besar dari manfaat maka akan mengurangi manfaatnya.

Pembuatan laporan keuangan di sektor pemerintahan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

2.5 Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan pemerintah yaitu

Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2.6 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas (Fauzia, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut: Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah pusat;
2. Pemerintah daerah;
3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2.6.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2004), yaitu:

a. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan digunakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, serta membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, dan memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya organisasi.

c. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

d. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan dalam menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan

datang, atau tidak dapat meneruskannya.

e. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat, selain itu laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan.

f. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa: Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2.6.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntansi keuangan perlu berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berdaya guna, agar dapat memenuhi keinginan dari para pemakai laporan keuangan. Kriteria persyaratan laporan keuangan dianggap dapat memenuhi keinginan tersebut, yaitu keinginan para pemakai laporan keuangan (Harahap, 2008).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai berikut: Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Penjelasan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan, apabila informasi yang tertera didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dan membantu pengguna laporan keuangan tersebut untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu ataupun masa kini, serta memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Ciri-ciri dari informasi yang relevan adalah:

- a. Memiliki umpan balik (*feedback value*)

Informasi dari laporan keuangan tersebut memungkinkan pengguna untuk mengoreksi atau menegaskan ekspektasi para pengguna laporan keuangan di masa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan, dapat membantu untuk memprediksi masa yang akan datang, berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian di masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi pada laporan keuangan disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi disajikan dalam laporan keuangan, disajikan selengkap-lengkapannya yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi didalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta yang terjadi secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang dihasilkan oleh suatu laporan keuangan mungkin relevan, tetapi apabila penyajiannya tidak dapat diandalkan maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tidak memiliki kualitas yang baik, atau dalam arti lainya informasi yang tertera dalam laporan keuangan tersebut menyesatkan. Karakteristik dari informasi yang andal adalah:

a. Penyajian yang jujur

Informasi digambarkan dengan jujur, transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, harus menghasilkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netral

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya (perbandingan internal) atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain (perbandingan eksternal).

4. Dapat dipahami

Informasi yang tertera dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna mempelajari informasi yang dimaksud.

2.6.4 Komponen Laporan Keuangan Menurut PP No.71 Tahun 2010

Komponen laporan keuangan menurut PP No.71 Tahun 2010 memiliki perbedaan dengan PP No.24 Tahun 2005. Berikut ini merupakan perbedaan antara PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No.71 Tahun 2010:

Tabel 2.1

Perbedaan Komponen Laporan Keuangan Menurut PP No.24/2005 dengan PP No.71/2010

PP No.24 Tahun 2005	PP No.71 Tahun 2010
Komponen Laporan Keuangan Pokok: 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan	Komponen Laporan Keuangan Pokok: A. Laporan Anggaran: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan yang bersifat optional: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Keuangan 2. Laporan Perubahan Ekuitas 	B. Laporan Finansial <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Operasional 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan
---	---

Sumber: PP No.71 Tahun 2010

Berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam SAP Berbasis Akrual adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Ketujuh laporan keuangan tersebut sesuai dengan komponen laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010. Berikut merupakan penjelasan mengenai komponen Laporan Keuangan Menurut PP No.71 Tahun 2010 seperti yang tertera pada Tabel 2.1:

a) Laporan Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA). PP No 71. Tahun 2010 menetapkan basis pencatatan yang digunakan adalah akrual, namun dalam penyusunan LRA tetap disajikan dengan menggunakan basis kas.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL). Dalam PSAP Basis Akrual (BA) 01 paragraf 41 dijelaskan bahwa LSAL lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk pos-pos berikut:
 - a. Saldo anggaran lebih awal.
 - b. Penggunaan saldo anggaran lebih.
 - c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan.
 - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

e. Saldo anggaran lebih akhir.

b) Laporan Finansial

1. Neraca. Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2. Laporan Operasional (LO). LO merupakan salah satu laporan yang harus disusun oleh pemerintah daerah setelah dikeluarkan PP No.71 Tahun 2010. Manfaat disusunnya LO ialah tersedianya informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
3. Laporan Arus Kas (LAK). LAK merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
 - a. Ekuitas awal
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas
 - d. Ekuitas akhir
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). PSAP BA 01 tentang penyajian laporan keuangan paragraf 83 menjelaskan bahwa CALK meliputi penjelasan naratif/rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LSAL, LO, LPE, neraca, dan LAK. Selain itu, CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan. CALK mengungkapkan/ menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum mengenai entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- b. Menyediakan informasi mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Menyediakan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.7 Tinjauan Empirik (Penelitian Terdahulu)

Pada tabel 2.2 merupakan beberapa ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

Tabel 2.2

Review Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Purnawaniati Nugrahaeni, Imam Subaweh (Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol 13, April 2008)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada inspektorat Jendral Depaertemen Pendidikan Nasional	Variabel independen (X) adalah Standar Akuntansi Pemerintahan	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional
2.	Nur Aita Solihat Fatmawati (2009)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bandung	Variabel independen (X) adalah Standar Akuntansi Pemerintah, variable (Y) adalah Kualitas Laporan Keuangan, lokasi penelitian yang dilakukan, yaitu Pemerintah Kota Bandung	Hasil penelitiannya bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat dan positif antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kulaitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hubungan yang cukup kuat ini menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah menunjang kualitas informasi keeuangan Pemerintah Daerah tersebut.
3.	Arif Ardi Kusumah (Jurnal, 2012)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota TasikMalaya	Variable independen (X) adalah Standar Akuntansi Pemerintahan, Variabel Dependen (Y) adalah Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan

Sumber: Data diolah 2018

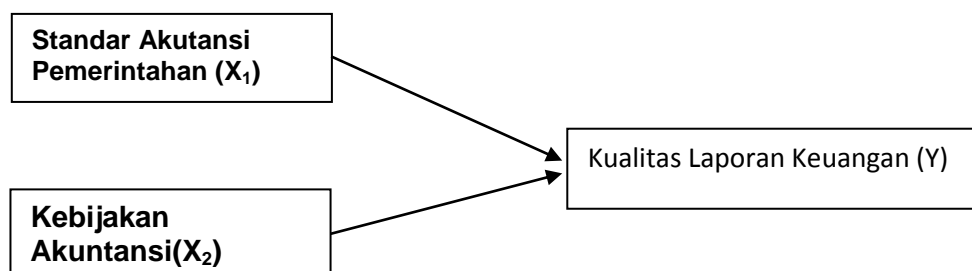
2.8 Kerangka Pemikiran

2.8.1 Hubungan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, maka dengan kata lain Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu syarat yang mempunyai kekuatan hukum didalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam SAP Berbasis Akrual adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Ketujuh laporan keuangan tersebut sesuai dengan komponen laporan keuangan menurut PP No. 71, dimana ketujuh laporan keuangan tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Berdasarkan landasan teori, dan penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran yang dapat penulis sampaikan pada gambar 2.1:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber Data diolah 2018

2.9 Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.

a. Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 9 menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbunyi: "Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu Standar Akuntansi Pemerintahan juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar akuntansi.

Subaweh dan Nugraheni (2008) menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh sangat lemah terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional serta dengan adanya penerapan SAP didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang diterapkan membuat laporan keuangan yang disajikan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kusumah (2012) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari kedua penelitian yang telah diuraikan diatas memiliki hasil sama yaitu adanya pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan meskipun tingkat pengaruhnya masih berbeda-beda.

b. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh badan pemerintah, yaitu Departemen Pendidikan dan kebudayaan dan Departemen Keuangan yang bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang memberikan cara dalam hal mengatur aktivitas ekonomi, khususnya informasi keuangan. Kebijakan akuntansi adalah

batang tubuh standar akuntansi, pendapat, penafsiran, aturan dan regulasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam melaporkan keuangan mereka. Kebijakan akuntansi suatu perusahaan mencakup "metode-metode untuk menerapkan prinsip-prinsip oleh manajemen satuan usaha dianggap sebagai prinsip-prinsip yang paling tepat untuk keadaan saat itu, untuk menyatakan secara wajar posisi keuangan, perubahan dalam posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai prinsip-prinsip yang berlaku secara umum yang karenanya telah dipakai untuk menyusun laporan keuangan tersebut.

Kebijakan Akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan.

Elden S Hendriksen diterjemahkan oleh Marianus Sinaga (1996:109) mengatakan bahwa kebijakan akuntansi adalah proses pemilihan metode pelaporan, alternative, system pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh suatu perusahaan. Kebijakan akuntansi menurut SAP (2002:1) adalah kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam

penyusunan laporan dan penyajian laporan keuangan.

c. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang menunjukkan kinerja dari kepala daerah untuk bertanggungjawab atas wewenang yang telah diberikan kepadanya dalam mengelola organisasi yang ada di bawah kepemimpinannya. Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar yang diukur berbasis kadar ketidakpastian dan dicapai melalui pemeriksaan (Mulyana, 2010). Laporan keuangan sektor publik berbeda dengan laporan keuangan sektor swasta. Pada hakekatnya, laporan keuangan digunakan penggunaannya untuk pengambilan keputusan serta mengadakan evaluasi atas sumber daya yang digunakan. Permana (2011), kualitas laporan keuangan diartikan sebagai suatu pencatatan, suatu proses dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas dana publik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah selaku penyedia laporan keuangan daerah harus menyediakan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Untuk itulah pemerintah memerlukan suatu standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut. Kualitas Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya.

2.10 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka Pemikiran di atas hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Standar Akuntansi

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

b. Kebijakan akuntansi

Kebijakan Akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan.

H2 : Kebijakan Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki nilai t hitung 4,272 dan signifikansi 0,000 sehingga nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari variabel penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi 0,490 yang dapat diartikan adanya pengaruh positif, artinya semakin baik ukuran penerapan standar akuntansi pemerintah maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin baik.
2. Kebijakan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan variabel kebijakan akuntansi memiliki nilai t hitung 2,398 dan signifikansi 0,019 sehingga nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari variabel kebijakan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi 0,274 yang dapat diartikan adanya pengaruh positif, artinya semakin baik kebijakan akuntansi maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin baik.
3. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan kebijakan akuntansi berpengaruh simultan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung yaitu 39,106 dan signifikansi 0,000. Variabel penerapan standar akuntansi dan

kebijakan akuntansi secara bersama-sama mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 49,1%.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan (Pihak terkait)

Pada penelitian ini diperoleh variabel penerapan standar akuntansi dan kebijakan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pengarahan kepada pegawai agar pembuatan laporan keuangan berstandarakuntansi dan kebijakan yang berlaku.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menganalisis faktor lainnya yang diduga memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah.

KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Serta Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara

Yth.Bapak/Ibu Responden

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat untuk meneliti "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Serta Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara", Informasi Bapak/Ibu sangat berguna bagi penelitian ini, karena Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk mengutarakan pengalaman dan pendapat mengenai hal ini. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar.

Sesuai dengan kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiaannya. Atas waktu dan kerjasama Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih

PENELITI

Mahasiswa

Susanty Pakambanan P

L A M P I R A N

KUESIONER PENELITIAN

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)						
Pembuatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						
1	Standar akuntansi pelaporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan konsolidasi					
2	Standar akuntansi penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan laporan keuangan konsolidasi telah mencakup seluruh realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan					
3	Laporan Keuangan gabungan (konsolidasi) yang merupakan Laporan keuangan pemerintah daerah ditetapkan dengan 5 jenis laporan					
4	Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Pemerintah Daerah telah direview oleh inspektorat kabupaten sebelum disampaikan kepada BPK					
Prosedur Pencatatan Akuntansi dengan Pencatatan yang Berlaku Umum						
5	Pencatatan atas laporan keuangan pemerintah daerah disusun secara sistematis					
6	Pencatatan setiap transaksi keuangan di dukung oleh bukti transaksi					

7	Pencatatan seluruh penerimaan dan Pengeluaran telah bebas dari Kesalahan pembebanannya pada rekening bersangkutan					
8	Pencatatan nilai piutang telah dilakukan berdasarkan penilaian kualitas piutang sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang telah ditetapkan.					
Pencatatan Aset Pemerintah Daerah						
9	Nilai aset pada laporan keuangan telah disajikan adanya nilai Penyusutan dan penyusutannya telah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berkembang.					
10	Aset tetap yang nilainya telah nol Pada umumnya telah dilakukan penghapusan buku dan telah dilakukan pelepasan untuk aset yang masih mempunyai nilai manfaat					
11	Aset yang fisiknya telah rusak berat atau fisiknya tidak ditemukan telah dilakukan pencatatannya pada daftar khusus aset lain-lain					
12	Pencantuman nilai aset telah didasarkan pada harga perolehan dan didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah					
13	Perbandingan jumlah belanja modal wajib sama dengan nilai aset yang bertambah pada tahun berkenaan.					

2. Kebijakan Akuntansi

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
2. Kebijakan Akuntansi (X2)						
Penetapan Peraturan Tentang Kebijakan Akuntansi						
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara telah menetapkan peraturan Bupati tentang Kebijakan akuntansi pemerintah daerah.					
2	Pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah telah sesuai dengan Standar akuntansi pemerintahan yang mengacu pada PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013.					
3	Kebijakan akuntansi pemerintah daerah telah mengatur tentang kebijakan akuntansi pelaporan dan kebijakan akuntansi.					
4	Kebijakan akuntansi pemerintah daerah telah mengatur mengenai defenisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi.					
5	Penetapan kebijakan akuntansi pemerintah daerah selalu di update/selalu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.					
Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan						
6	Kebijakan akuntansi pemerintah daerah telah menerapkan Standar Akuntansi berbasis Akrual.					

7	Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebelum diterapkan penggunaannya terlebih dahulu telah di sosialisasikan kepada seluruh petugas penyusun laporan keuangan.					
8	Kebijakan akuntansi yang digunakan dapat dibandingkan dengan kabupaten lain tetapi masih entitas yang sejenis					
9	Kebijakan akuntansi pemerintah daerah telah memuat penjelasan atas unsur laporan keuangan sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan					

3. Kualitas Laporan Keuangan Pemertintah Daerah

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)						
RELEVAN						
1	Laporan Keuangan yang disajikan dapat membantu mengevaluasi atau dapat di hubungkan dengan penggunaannya.					
2	Laporan keuangan memiliki manfaat atau umpan balik atau memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan mengoreksi ekspektasinya di masa lalu					
3	Laporan keuangan memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang.					
4	Laporan keuangan telah disusun atau disajikan tepat waktu sehingga dapat berguna untuk pembuatan keputusan pimpinan.					
5	Laporan Keuangan memuat informasi yang selengkap mungkin dan telah mencakup seluruh informasi akuntansi.					
Andal						
6	Transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.					
7	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memuat informasi yang jujur dan wajar disajikan.					
8	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memuat informasi yang dapat diuji.					
9	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memua informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak kepada kebutuhan tertentu.					
DAPAT DIPAHAMI						
10	Informasi laporan keuangan apabila diuji oleh pihak berbeda akan mewujudkan simpulan yang berbeda					

11	Informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan tertentu					
12	Informasi dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas					
13	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat Dipahami oleh pengguna laporan keuangan					

Sumber: Data diolah 2018

Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	47	56.0	56.0	56.0
	2	37	44.0	44.0	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<=40 th	19	22.6	22.6	22.6
	>=51	33	39.3	39.3	61.9
	41-50 th	32	38.1	38.1	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

SKPD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bapenda	3	3.6	3.6	3.6
	Bappeda	1	1.2	1.2	4.8
	BPKAD	2	2.4	2.4	7.1
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2	2.4	2.4	9.5
	Dinas Kesehatan	4	4.8	4.8	14.3
	Dinas Ketahanan Pangan	4	4.8	4.8	19.0
	Dinas P3AP2KB	3	3.6	3.6	22.6
	Dinas Perdagangan	1	1.2	1.2	23.8
	Dinas Perhubungan	3	3.6	3.6	27.4
	Dinas Perindustrian	1	1.2	1.2	28.6
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	3.6	3.6	32.1
	Dinas Pertanian	2	2.4	2.4	34.5
	Dinas Sosial	4	4.8	4.8	39.3
	Dinas TK dan Transmigrasi	1	1.2	1.2	40.5
	Dispora	4	4.8	4.8	45.2
	DPMPTSP	1	1.2	1.2	46.4
	DPTMPTSP	1	1.2	1.2	47.6
	Inspektorat	3	3.6	3.6	51.2
	Kecamatan Balusu	2	2.4	2.4	53.6
	Kecamatan Bangkelekila	3	3.6	3.6	57.1
	Kecamatan Baruppu'	2	2.4	2.4	59.5
	Kecamatan Buntao	2	2.4	2.4	61.9
	Kecamatan Denpina	3	3.6	3.6	65.5
	Kecamatan Kesu'	4	4.8	4.8	70.2
	Kecamatan Rantebua	3	3.6	3.6	73.8
	Kecamatan Rantepao	4	4.8	4.8	78.6
	Kecamatan Sangalangi	3	3.6	3.6	82.1

Kecamatan Sesean	4	4.8	4.8	86.9
Kecamatan Sopa	4	4.8	4.8	91.7
Kecamatan Tallunglipu	3	3.6	3.6	95.2
Kecamatan Tondon	4	4.8	4.8	100.0
Total	84	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	3	3.6	3.6	3.6
	S1	63	75.0	75.0	78.6
	S2	14	16.7	16.7	95.2
	SMA	4	4.8	4.8	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

Latar Belakang Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Administrasi Negara	3	3.6	3.6	3.6
	Akuntansi	14	16.7	16.7	20.2
	Elektro	1	1.2	1.2	21.4
	Fisika	1	1.2	1.2	22.6
	Geografi	1	1.2	1.2	23.8
	Gizi	1	1.2	1.2	25.0
	Hukum	5	6.0	6.0	31.0
	Ilmu Administrasi Negara	1	1.2	1.2	32.1
	Kesehatan	2	2.4	2.4	34.5
	Komputer	1	1.2	1.2	35.7
	Komunikasi	1	1.2	1.2	36.9
	Manajemen	28	33.3	33.3	70.2
	MIPA	3	3.6	3.6	73.8
	Pendidikan	5	6.0	6.0	79.8
	Perikanan	1	1.2	1.2	81.0
	Pertanian	3	3.6	3.6	84.5
	Peternakan	1	1.2	1.2	85.7
	Sastra Inggris	1	1.2	1.2	86.9
	SMA	4	4.8	4.8	91.7
	Sosial	2	2.4	2.4	94.0
	Sospol	1	1.2	1.2	95.2
	Teknik	4	4.8	4.8	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

		Lama Bekerja			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-5 Tahun	5	6.0	6.0	6.0
	5-10 Tahun	22	26.2	26.2	32.1
	Lebih 10 Tahun	57	67.9	67.9	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

Uji Validitas dan Reliabilitas

Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	84	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	84	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.780	13

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	23.4524	18.540	.531	.759
X1.2	23.3810	18.480	.435	.764
X1.3	22.7500	18.334	.236	.791
X1.4	23.6190	18.480	.398	.767
X1.5	23.5357	18.830	.474	.764
X1.6	23.7500	18.792	.452	.765
X1.7	23.1667	17.249	.436	.764
X1.8	23.1905	18.855	.463	.764
X1.9	23.3095	16.891	.680	.740
X1.10	23.1071	18.627	.348	.772
X1.11	23.0238	18.240	.370	.770
X1.12	23.4643	18.252	.595	.754
X1.13	22.6786	17.377	.303	.788

Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	84	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	84	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.899	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	15.4881	8.060	.722	.883
X2.2	15.3333	8.514	.571	.894
X2.3	15.3571	8.136	.806	.879
X2.4	15.2976	8.308	.682	.886
X2.5	15.4524	8.130	.645	.889
X2.6	15.5119	7.964	.690	.885
X2.7	15.3929	7.784	.694	.885
X2.8	15.0714	8.477	.443	.906
X2.9	15.3810	7.781	.799	.877

Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	84	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	84	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.788	13

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Y.1	25.9167	19.885	.438	.775
Y.2	25.7738	18.611	.520	.765
Y.3	25.7500	18.672	.488	.768
Y.4	25.7857	17.544	.582	.756
Y.5	25.8095	18.325	.593	.759
Y.6	25.5357	18.589	.411	.774
Y.7	25.9286	19.537	.382	.777
Y.8	25.8214	19.401	.502	.770
Y.9	25.8333	18.020	.590	.758
Y.10	24.6548	18.349	.293	.794
Y.11	24.5238	18.277	.246	.807
Y.12	25.8333	19.972	.405	.777
Y.13	25.9762	19.734	.376	.778

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, Arif. Muchlisdan Iskandar. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bowo.2009.Melalui:<http://www.ahmadheryawan.com/component/content/article/94-kolom/3363-hasil-audit-bpk.pdf>.Diakses pada 21 April2018.
- Erlina, Sri Mulyani, 2007. *Metedologi Penelitian Bisnis :Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cetakan Pertama USU Press, Medan.
- Fauzia, Risa Ayu. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung. Melalui: <http://repository.widyatam.ac.id>. Diakses pada 21 April 2018.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*.Semarang :Badan PenerbitU niversitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*.Semarang :Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hoesda, Jan.2014.Melalui:<http://ksap.org/sap/peraturan-daerah-tentang-kebijakan-akuntansi>. Diakses pada 21 April2018.
- Kusumah. 2012. <http://digilib.unila.ac.id/10563/16/BAB%20II.pdf>
- Lubis, Ade Fatma. 2012. *Metode Penelitian Akuntansi dan Format PenulisanTesis*. Medan: USU Press.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyana, 2010. <http://digilib.unila.ac.id/10563/16/BAB%20II.pdf>
- Noerdiawan, D. Iswahyudi Sandi Putra, Maulidah Rahmawati. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purwita, Erma. 2013. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Kuningan*. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung. Melalui :<http://repository.widyatama.ac.id>. Diakses 21 April 2018.

Supranto, J. 2000. *Statistik (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 8, Cetakan kedelapan. Bandung:

CV.Afabeta.

_____. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta

Subaweh, Nugraheni. 2008. <http://digilib.unila.ac.id/10563/16/BAB%20II.pdf>

Sekaran, Uma. 2004. *Metodologi Penelitian untuk Bisni s*. Jakarta: Salemba Empat.

Setiawati, Ririz. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Jember*. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Jember, Jember. Melalui: <http://repository.unej.ac.id>. Diakses pada 21 April2018.

Umar, Husein. 2001. *Metode Penelitian dan Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta:PTGramedia Pustaka.

Widjajarso, Bambang. 2008. *Penerapan Basis AkruaI Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan*.